

**MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DI SEKTOR
PENDIDIKAN**

Fadli Triandira Hermawan, Edy Soesanto, Septian Dwi Nurcahyo

**Email : 202310415204@mhs.ubharajaya.ac.id Edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id
202310415321@mhs.ubharajaya.ac.id**

Fakultas Ilmu Komunikasi-Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami terjadinya tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Sebab dan akibat dari dari tindak pidana korupsi kian mengkhawatirkan dengan semakin banyak kasus tindak pidana korupsi berarti semakin banyak pula yang di rugikan diantaranya negara dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat memberikan dorongan antara individu satu dengan individu lainnya untuk saling menjaga dan melindungi bangsa serta negara dari tindak pidana korupsi salah satunya membantu mengsucceskan pendidikan anti korupsi.

Kata Kunci: Faktor, Dampak, Data, Pencegahan Korupsi Di Sektor Pendidikan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat diancam dengan hukuman penjara atau denda. Korupsi telah menjadi penyakit serius dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dapat merusak seluruh aspek kehidupan. Korupsi dapat memberikan dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dengan menimbulkan kerugian yang sangat besar serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan moral masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya masyarakat sipil saja, namun banyak di antara mereka adalah aparat penegak hukum, dan pihak yang mempunyai kekuasaan, status, dan kewenangan yang seharusnya memberantas praktik korupsi justru melakukan hal sebaliknya. (Widyaningrum et al., 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Agung et al., n.d.) terkhusus pasal 2 dan 3 yang di jelaskan tentang pengelompokan pengertian korupsi dari aspek kerugian keuangan Negara, yaitu melawan serta melanggar hukum untuk memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri. Setiap

penyimpangan terhadap keuangan pemerintah dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. (Novelin Butarbutar et al., 2022) Tindakan tersebut berdampak pada perekonomian negara dan juga dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan nasional. Korupsi dan kejahatan lainnya harus sesegera mungkin diberantas dari negara kesatuan NKRI. (Visi Komunikasi & Suryani Akademi Komunikasi BSI Jakarta, 2013)

Aktivis anti-apartheid dan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Pernyataan ini bertolak belakang dengan situasi di Indonesia. Pendidikan dijadikan alat untuk menggerogoti anggaran yang seharusnya membuat hidup masyarakat lebih cerdas. Salah satu faktanya adalah masih maraknya pengalihan anggaran di sektor pendidikan.

Sebuah kenyataan yang terjadi di negara ini bahwa oknum-oknum di dunia pendidikan begitu merajalela, terlihat sudah banyak terdata sekolah-sekolah di Indonesia yang melakukan pelanggaran korupsi. Oleh karena itu penulis meneliti penyebab dan faktor-faktor terjadinya korupsi di sekolah. (Nugroho & Fahmi, 2022)

METODE

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian ini bersifat sistematis terhadap bagian bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan hubungannya. yang datanya dinyatakan dalam bentuk yang valid. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber informasi dan perilaku yang dapat diamati.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang secara sistematis memajukan penelitian dari sudut pandang komponen, fenomena, dan hubungan sebab akibat di antara keduanya. Data tersebut direpresentasikan dalam format yang valid. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder.

ANALISIS DATA PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Pada dasarnya, langkah-langkah dalam menerapkan teknik analisis ini terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, hingga kesimpulan. Dari setiap tahapan sangat penting dan tidak boleh terlewatkan untuk mendapatkan hasil yang konkret.

Tahapan diantaranya:

a. Menyiapkan Konsep

Fase ini meliputi pemahaman konsep dasar penelitian, merancang pertanyaan penelitian, menentukan metode pengumpulan data, dan membuat panduan wawancara dan kuesioner sebelum melanjutkan ke tahap proses berikutnya, yaitu tahap pengumpulan data.

b. Mengumpulkan Data

Pada tahapan ini peneliti telah melakukan observasi di media massa dengan data sekunder. Terkumpulah beberapa aspek penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu, aspek sosial, aspek hukum, dan aspek ekonomi

c. Mereduksi Data

Dalam prosesnya, seorang peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data atau temuan penelitian. Selanjutnya, setelah semua data telah didapatkan, peneliti melakukan proses reduksi data. Reduksi data merupakan tahap pemilihan data yang ditemukan yang memenuhi syarat penelitian.

d. Mengolah Data

Setelah data direduksi, biasanya peneliti melanjutkan ke tahap pengolahan data. Pengolahan data ini dapat dilakukan dalam bentuk klasifikasi data. Yang dimaksud dengan "data kategoris" adalah pengklasifikasian data penelitian berdasarkan kategori yang telah disusun untuk memudahkan pengolahannya. Proses pemrosesan data biasanya menghasilkan kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan Anda menarik kesimpulan atau mengambil tindakan. Bisa dalam bentuk uraian singkat, diagram, flowchart, kode/symbol, dan lain-lain.

e. Analisis Data

Analisis data kuantitatif Analisis data terjadi ketika proses pengolahan data selesai. Dilihat dari jumlah pasangan variabel yang dianalisis,

f. Interpretasi Data

Setelah penelitian selesai, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data. Bagi yang masih bingung, interpretasi data adalah proses menjelaskan kumpulan data yang sedang diolah. Data sebelumnya yang berupa grafik, tabel, dan lain-lain dijelaskan melalui proses yang disebut interpretasi data. Oleh karena itu interpretasi data dilakukan setelah peneliti melakukan analisis data.

PEMBAHASAN

Korupsi di sektor pendidikan masih merajalela di Indonesia. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), aparat penegak hukum menindak 240 kasus korupsi di sektor pendidikan dalam enam tahun sejak 2016 hingga September 2021. Pada periode ini, korupsi ini merugikan pemerintah sebesar Rp 1,6 triliun. Jika ditilik dari tahun 2006 hingga September 2021, kerugian negara sebenarnya mencapai Rp 2,9 triliun. (Widyastono et al., 2013)

Kita bisa melihat jumlah kasus korupsi di sekolah terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 terdapat (23 persen), tahun 2020 (29 persen), dan tahun 2021 (44 persen), kini meningkat menjadi 93 persen. Dia mengumpulkan data ini dari berbagai jenis survei yang dilakukan dan laporan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS dalam pengelolaan anggaran sekolah jelas merupakan hal yang lumrah. Hal ini terutama dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah yang seharusnya menjadi panutan dan panutan bagi siswa di lingkungan sekolah. Ironis sekali. Ia meyakini jika hal ini terus berlanjut, maka lingkungan sekolah tidak lagi menjadi tempat pengembangan karakter anak, dan akan muncul iklim pendidikan yang kotor dan tidak bermoral.

Data Penelitian

Berdasarkan grafik tersebut, aparat penegak hukum paling banyak menindak kasus korupsi pada tahun 2017, yakni sebanyak 57 kasus. Sedangkan angka penularan terendah terjadi pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus. Korupsi di sektor pendidikan terus berlanjut

bahkan meningkat selama pandemi COVID-19. Jumlahnya meningkat menjadi 29 pada tahun 2020 dan 30 pada tahun 2021. Secara umum, kasus korupsi terbanyak terkait dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang berjumlah 52. Angka ini mewakili 21,7% dari seluruh kasus korupsi di sektor pendidikan selama enam tahun terakhir. Kita bisa melihat jumlah kasus korupsi di sekolah terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 terdapat (23 persen), tahun 2020 (29 persen), dan tahun 2021 (44 persen), kini meningkat menjadi 93 persen. Dia mengumpulkan data ini dari berbagai jenis survei yang dilakukan dan laporan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS dalam pengelolaan anggaran sekolah jelas merupakan hal yang lumrah. Hal ini terutama dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah yang seharusnya menjadi panutan dan panutan bagi siswa di lingkungan sekolah. Ironis sekali. Ia meyakini jika hal ini terus berlanjut, maka lingkungan sekolah tidak lagi menjadi tempat pengembangan karakter anak, dan akan muncul iklim pendidikan yang kotor dan tidak bermoral. (Sugiarti et al., 2019)

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi di Sektor Pendidikan

1. Sifat Serakah/Tamak/Rakus Manusia keserakahan dan ketamakan merupakan sifat yang membuat seseorang merasa apa yang dimilikinya tidak cukup dan selalu menginginkan lebih. Keserakahan menciptakan seseorang menjadi karakter yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya.
2. Gaya Hidup Konsumtif, sifat serakah dan gaya hidup konsumtif menjadi pemicu korupsi internal. Korupsi bisa terjadi Ketika seorang menjalani gaya hidup konsumtif namun tidak memiliki penghasilan yang cukup.
3. Moral yang lemah, lemahnya keimanan, kejujuran, dan intelektual yang rendah.
4. Aspek Sosial, kondisi sosial di suatu wilayah terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya.
5. Aspek Hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi terbesar bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum.
6. Aspek Ekonomi Faktor ekonomi sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan yang tak dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Dampak Korupsi di Sektor Pendidikan

1. Merosotnya kualitas pendidikan Kualitas pendidikan menjadi yang pertama yang diserang oleh tindak korupsi dalam sektor pendidikan. Merosotnya kualitas pendidikan ditandai dengan tidak adanya atau rendahnya perlengkapan yang

berkualitas, adanya kualitas dari guru yang dimana banyak membeli posisi jabatan disekolah.

2. Kerugian Finansial Kerugian finansial berdampak kepada masyarakat dan negara dimana banyak terjadi di sekolah yaitu pungutan-pungutan liar dengan alasan infaq dan lain sebagainya. Anggaran 20% APBN dan APBD yang di korupsi oleh pejabat sekolah juga menjadi kerugian pada negara. (Ubwarin et al., n.d.)
3. Ketidakadilan Sosial Dimana sering terjadi calon siswa yang di alihkan ke sekolah lain dikarenakan ada orangtua dari salah satu calon siswa yang memberikan uang kepada oknum pihak sekolah agar putra/nya sekolah sesuai dengan apa yang di inginkan. Hal ini dapat merugikan banyak masyarakat dan mengganggu proses berpendidikan sebagaimana mestinya.

Upaya Pencegahan

Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, antara lain melalui pembentukan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusut berbagai kasus korupsi sejak didirikan pada tahun 2002 hingga saat ini. Namun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dilansir Transparency International (TI) masih rendah. Faktanya, pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat negara paling korup di kawasan Asia-Pasifik, dan pada tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada angka 3,0, menempatkan Indonesia pada peringkat 100 dari 183 negara di dunia (Transparency International, 2011). Untuk mengatasi fenomena ini diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif, baik dari perspektif penegakan hukum dan kebijakan administrasi nasional, serta pendidikan formal di sekolah (Aditjondro, 2002). Beberapa negara telah menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah dengan sukses besar. (Montessori, n.d.)

Dibandingkan dengan strategi antikorupsi lainnya, penerapan pendidikan formal antikorupsi di sekolah akan membawa beberapa manfaat bagi negara, baik secara praktis, teoritis, dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang stabil. Kedua, anggaran negara tidak akan meningkat secara signifikan. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi nasional jangka panjang.

Sesuai pada tujuan yang ingin dicapai, beberapa aspek relevan yang harus diperhatikan ketika menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah (Modern Didactic Center, 2006):

1. Pemahaman tentang korupsi.

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan relevan tentang korupsi, pelajar perlu memiliki akses terhadap berbagai informasi, terutama informasi yang memungkinkan mereka mengenali tindakan korupsi dan membedakannya dengan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang norma, penyebab, dan akibat korupsi menjadi materi yang paling penting untuk diajarkan kepada siswa. (Mega Wijaya, n.d.)

Selain itu, siswa mempunyai alasan yang jelas mengapa korupsi dianggap sebagai praktik buruk dan harus dihindari. Dengan menganalisis sebab dan akibat perbuatan korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai korupsi secara lebih luas. Berbagai alternatif pencegahan korupsi pada akhirnya dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa tentang berbagai cara untuk memberantas korupsi. Itu semua merupakan modal dasar untuk mengembangkan atau melatih sikap dan karakter anti korupsi. (Sakinah & Bakhtiar, 2019)

Berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki tersebut diharapkan siswa mampu untuk menilai adanya perilaku korupsi dalam masyarakat atau institusi di sekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan informasi itu diperlukan agar siswa mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai. Dengan kata lain berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi siswa mampu memahami apakah tindakan tersebut termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan baik atau buruk. Dengan harapan siswa dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.

2. Pengembangan sikap dan Karakter

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi menitikberatkan pada pengembangan aspek sikap peserta didik. Sikap adalah disposisi evaluatif terhadap suatu objek berdasarkan pengetahuan, respon emosional, kemauan, dan perilaku sebelumnya terhadap objek tersebut (Fishbean et al., 1973). Semua unsur di atas saling berkaitan dan bertukar tempat. Misalnya, reaksi emosional menutupi perilaku normal. Oleh karena itu, sikap pro korupsi tidak hanya satu kategori saja, namun mencakup kategori lainnya. (Rahmawati et al., n.d.-a)

Mengubah satu elemen juga mengubah elemen lainnya. Misalnya, menghilangkan niat dan perilaku dapat mengubah persepsi, sikap, dan respons emosional. Oleh karena itu, ketika mengajarkan informasi tentang korupsi, guru berupaya mengembangkan sikap

berbasis wawasan. Untuk itu siswa harus mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang benar agar ilmu tersebut diingat dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan untuk penalaran apa pun. Selain itu, bersikap proaktif dalam kegiatan yang mengandung nilai-nilai antikorupsi juga akan menimbulkan sikap yang selaras dengan nilai-nilai tersebut.

3. Perubahan sikap

Mengubah sikap sebelumnya memang tidak mudah dan terkadang bisa menimbulkan rasa frustrasi. Apalagi jika sikap Anda tidak sesuai dengan apa yang guru atau pendidik ingin Anda pikirkan, misalnya siswa menyontek saat ujian adalah hal yang wajar, atau Anda menerima pekerjaan rumah teman sebagai milik Anda. normal. Hal ini berlanjut pada sikap terhadap fenomena sosial seperti menyuap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas..

Pendidikan antikorupsi memerlukan perubahan sikap agar konsisten dengan nilai-nilai inti antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang dapat digunakan dari berbagai sumber. Misalnya, siswa dapat membentuk persepsi yang berlawanan mengenai korupsi melalui penyajian informasi yang tidak terduga melalui permainan dan parodi.

Strategi lain untuk mengubah sikap didasarkan pada kenyataan bahwa pengetahuan dan sikap disimpan di tempat yang berbeda atau dalam ingatan yang berbeda, dan oleh karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya. Artinya proses pengubahan pengetahuan menjadi sikap berlangsung sangat lama. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung menyerang atau membujuk pihak-pihak yang mendukung korupsi. Dalam jangka panjang, sikap tersebut otomatis akan berubah jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan secara bijak dan mahasiswa didorong untuk berpikir kritis terhadap fenomena tersebut. Sebab, reaksi di sini disebut dengan deferral effect (McInerney, 2006), dimana informasi pada awalnya tidak dipercaya, namun kemudian pengetahuan yang benar mengatasi reaksi emosional tersebut. (Rahmawati et al., n.d.-b)

4. Perspektif Moral dan Konvensional

Pendidikan antikorupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak membedakan secara jelas dua peraturan sosial: moralitas dan adat istiadat. Dari sudut pandang moral, perilaku yang baik dianggap baik karena diterima secara umum dan menjadi kewajiban setiap orang, apapun yang dipikirkan individu. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang

moral, suatu tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan konsekuensinya: apakah tindakan tersebut menyakitkan atau merugikan orang lain, atau apakah tindakan tersebut melanggar rasa keadilan setiap orang. Lebih jauh lagi, kualitas perbuatan seseorang ditentukan oleh niatnya. Sekalipun akibat yang ditimbulkannya tidak buruk, namun jika niat atau niat pelakunya buruk maka perbuatannya tidak akan diterima, dan sebaliknya, sekalipun akibat yang ditimbulkannya buruk, jika niatnya baik maka perbuatannya dapat diterima.

Perjanjian adalah norma-norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada dalam suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, peraturan ini tidak bersifat universal dan karenanya tidak mengikat komunitas lain. Dalam kehidupan nyata, moral dan adat istiadat saling terkait erat. Prinsip moral umum dapat direduksi menjadi norma-norma seperti "jangan mencuri, jangan berbohong, dan bersikap adil terhadap orang lain". Sebaliknya, melanggar adat istiadat yang dianggap sangat penting bagi suatu masyarakat, seperti menghormati orang yang meninggal, juga bisa menjadi pelanggaran moral karena melukai perasaan orang lain. Artinya, moralitas dan adat istiadat merupakan konsep yang berbeda dan memiliki logika yang berbeda.

Pendidikan antikorupsi harus mempertimbangkan perbedaan antara moralitas dan adat istiadat. Dari sudut pandang adat, apa saja diperbolehkan asalkan tidak dilarang, namun dari sudut pandang moral, suatu perbuatan dianggap masih dalam batas kewajaran atau tidak. Perspektif moral lebih sensitif terhadap pertimbangan kerugian yang menimpa seseorang, sedangkan perspektif konvensional lebih sensitif terhadap pelanggaran konsensus, konsistensi, dan harapan pemegang otoritas. Pelanggaran prinsip moral menyebabkan reaksi emosional yang lebih kuat. Perilaku manusia dalam menyikapi pelanggaran moral dan adat istiadat juga berbeda-beda. Jika suatu prinsip moral dilanggar, mereka meminta maaf atau berusaha mencari pembenaran atau alasan atas perilaku mereka, namun prinsip moral itu sendiri tidak dipertanyakan. Di sisi lain, ketika kita melanggar konvensi, kita mengkritik akarnya. Oleh karena itu, manusia secara naluriah mengetahui apa itu moralitas dan apa itu adat istiadat.

Berdasarkan pandangan Slavin (1994) mengenai tahapan perkembangan moral siswa dan penerimaan adat istiadat, maka pendidikan antikorupsi hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kematangan perkembangan moral siswa. Jelaskan kepada siswa sekolah menengah atas berusia 14 hingga 17 tahun bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi semua orang di semua lapisan masyarakat untuk menjaga sistem sosial yang

ada. Salah satu hal yang paling penting adalah bahwa korupsi dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang moral dan adat.

Lebih lanjut Aspin & Chapman (2007) juga menyatakan bahwa apa pun yang tercakup dalam pendidikan nilai, pendidikan moral adalah yang terpenting karena merupakan bagian dari kewajiban mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja. Bersiaplah menghadapi dunia yang menuntut perilaku lebih baik saat ini dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu secara serius menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan semangat siswa. (Manulun, 2012)

5. Pengembangan Karakter Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang ditetapkan oleh satu orang dan harus dipatuhi oleh orang lain. Seperti halnya kejahatan apa pun, korupsi adalah sebuah pilihan dan dapat dihindari. Oleh karena itu, pendidikan pada dasarnya adalah penyesuaian tingkah laku peserta didik menurut tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut menjadi bagian dari karakter siswa, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pendidikan antikorupsi: (Widodo et al., n.d.)

- a) Melatih siswa untuk menentukan pilihannya. Jika siswa mengungkapkan preferensi terhadap sesuatu selama diskusi, guru dapat menyarankan beberapa alternatif lain. Misalnya, ada banyak cara untuk mendapatkan nilai bagus. Berdasarkan pilihan tersebut, siswa dapat memutuskan mana yang lebih baik atau lebih buruk. Ketika siswa mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan keputusannya sendiri, maka ia juga mempunyai keberanian untuk mengatakan tidak atau ya terhadap suatu hal.
- b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman komprehensif dengan menciptakan situasi fleksibel di mana mereka dapat berkolaborasi, berbagi, dan menerima bimbingan yang mereka perlukan dari gurunya. Oleh karena itu, kegiatan analisis kasus, diskusi, role play, atau wawancara mahasiswa merupakan adegan yang menumbuhkan sikap antikorupsi pada diri mahasiswa.
- c) Kurangnya penekanan diberikan pada pencarian fakta-fakta seperti: berapa persentase pejabat yang terlibat korupsi, berapa banyak uang negara yang hilang karena korupsi setiap tahunnya, dan hukuman apa yang pantas untuk itu? Itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda mengajar siswa Anda. Kami akan membantu Anda menemukan sumbernya. Misalnya bagaimana dan mengapa informasi dikumpulkan, seberapa penting informasi yang diterima, pengetahuan apa yang dapat dipercaya, dan posisi apa yang sebaiknya dipilih.

Siswa diminta menganalisis posisi yang diambilnya, menjelaskan dan membenarkan pilihannya. Tidak ada posisi lain yang diambil. Dengan melatih siswa menggunakan teknik berpikir kritis, mereka akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

- d) Partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan sosial di dalam dan sekitar sekolah. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa hormat pada orang lain, melatih mereka untuk bertanggung jawab secara sosial di tempat mereka tinggal. Hal ini tidak berarti bahwa karakter lain tidak penting, namun mengungkapkan rasa tanggung jawab dan rasa hormat terhadap orang lain meringankan perasaan egois dan berpuas diri yang umumnya dimiliki oleh banyak orang yang terjatuh. (Handoyo & Susanti, n.d.),

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi di sektor pendidikan kian melonjak naik dari tahun pertahun. Keterangan di atas sudah menjelaskan secara garis besar faktor penyebab dari tindak pidana korupsi yang terjadi di ranah pendidikan, perlu gerakan signifikan dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi diajarkan untuk pembentukan sikap dan nilai dari karakter sebagai strategi untuk pembentukan sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan adil. Potensi tersebut dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan antara individu satu dengan individu lainnya. Dengan pemahaman faktor dan penyebab terjadinya korupsi kita menjadi paham akan akibat dari korupsi tersebut, betapa merugikan banyak pihak. Oleh karena itu mari kita jaga keberlangsungan hidup kita yang bebas dari korupsi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat hal yang dapat dijadikan masukan atau saran, antara lain sebagai berikut:

1. Perkuat penegak hukum, dengan di perkuatnya penegakan hukum tindak pidana kasus korupsi dan membuat jera para pelaku tersebut dapat memperkecil ruang lingkup mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Implementasikan pendidikan anti korupsi dari usia dini.
3. Kepada KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) harus lebih insentif kembali dalam mengontrol tiap-tiap sektor dan tiap-tiap celah dimana bisa di dimanfaatkan untuk oknum melakukan tindak pidana korupsi.

4. Terakhir kita sebagai generasi penerus bangsa harus paham betapa meruginya tindak pidana korupsi dan kita harus ikut andil menjaga kehidupan bangsa dan negara dengan saling peduli antara individu satu dengan individu lainnya. (Visi Komunikasi & Suryani Akademi Komunikasi BSI Jakarta, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, G., Dike, A., Gusti, W. I., & Ariawan, K. (n.d.). *MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA UNTUK BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI* (Vol. 2).
<http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/22/korups>
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (n.d.). *DAMPAK KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DI SMA SEMESTA KOTA SEMARANG.*
- Manurung, R. T. (2012). *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI SATUAN PEMBELAJARAN BERKARAKTER DAN HUMANISTIK.*
- Mega Wijaya, M. (n.d.). *PALAR (Pakuan Law Review).*
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Montessori, M. (n.d.). *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH.*
- Novelin Butarbutar, A., Penulis, K., & Alamat, *. (2022). *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Terkhusus Pada Perguruan Tinggi Guna Pencegahan Korupsi.*
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Nugroho, S. D., & Fahmi, I. (2022). Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 530–538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7068064>
- Rahmawati, R., Sari, Y. N., & Sukabumi, S. P. (n.d.-a). *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Vol. 01, Issue 01).
- Rahmawati, R., Sari, Y. N., & Sukabumi, S. P. (n.d.-b). *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Vol. 01, Issue 01).

- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *Journal of Primary Education*, 2(1), 39–49.
- Sugiarti, P. A., Wardani, K., Ayu, G., Rencana, K., Dewi, S., Kurniawan, P. S., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2019). ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 10, Issue 2).
- Ubwarin, E., Salamor, Y. B., Leatemia, W., & Salamor, A. M. (n.d.). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SMA di Kabupaten Maluku Tengah. In *Online) Journal of Community Services* (Vol. 1, Issue 2).
- Visi Komunikasi, J., & Suryani Akademi Komunikasi BSI Jakarta, I. (2013). *Ita Suryani: Penanaman Nilai anti Korupsi di Perguruan Tinggi PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI: Vol. XII* (Issue 02).
- Widodo, S., Al, S., & Surabaya, H. (n.d.). *MEMBANGUN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR*. <https://doi.org/10.21009/JPD.010.04>
- Widyaningrum, H., Nur Rohman, A., Ade Putri, E., Raya, J., Raya Perjuangan, J., Mulya, M., Utara, B., & Barat, J. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar* (Vol. 3, Issue 1). <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/Jabdimas>
- Widyastono, H., Kurikulum, P., Perbukuan, D., Kemdikbud, B., Sudirman, J. J., & Jakarta, S. (2013). STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH IMPLEMENTATION STRATEGY OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN SCHOOLS. In *Jurnal Teknodik* (Vol. 17).